



PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

NOMOR : 100.3.2 / 1335 / Kep-DPRD/9/2023

TENTANG

PROGRAM KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 372 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menyusun Program Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 8);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 74), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 2);

- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan Tanggal 29 Agustus 2023;
2. Hasil Rapat Kerja DPRD Kota Medan tanggal 16 s.d. 18 Juli 2023 di The Hill Hotel and Resort Sibolangit;
3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tanggal 05 September 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PROGRAM KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2024.

- KESATU : Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun 2024 meliputi:
1. Program, Kegiatan, dan Indikator serta Target Capaian Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2024.
 2. Rencana Jadwal Tahunan Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2024.

- KEDUA : Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa tabel, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 05 September 2023

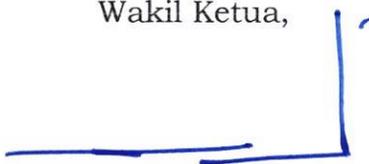
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

Ketua,



HASYIM, S.E.

Wakil Ketua,



Wakil Ketua,



Wakil Ketua,



H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M. H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I. H. T. BAHRUMSYAH, S.H., M.H

Tembusan:

1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : 100.3.2 / 1351

TANGGAL : 05 SEPTEMBER 2023

TENTANG : PROGRAM KERJA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA MEDAN
TAHUN 2024.

LAPORAN HASIL RAPAT KERJA DPRD KOTA MEDAN TAHUN 2023
DALAM RANGKA PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DPRD KOTA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2024
BERTEMPAT DI THE HILL HOTEL AND RESORT SIBOLANGIT
TANGGAL 16 s.d. 18 JULI 2023

Berdasarkan perhitungan hari kerja pada tahun 2024, maka disimpulkan bahwa:

- a. Hari kerja, sebanyak 251 hari; dan
- b. Minggu efektif, sebanyak 48 minggu.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka disampaikan beberapa catatan penting yang menjadi kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perjalanan dinas seluruh alat kelengkapan dewan (AKD) dan AKD lainnya maksimal sejumlah 60 (enam puluh) kali disesuaikan dengan hari kerja;
- b. kegiatan perjalanan dinas yang dimaksud diatas dilaksanakan maksimal selama 5 (lima) hari dalam seminggu untuk kegiatan kunjungan kerja dimulai hari Selasa s.d Sabtu apabila hari Senin dilakukan Rapat Paripurna.
- c. Kegiatan Paripurna dilakukan pada hari Senin.
- d. kegiatan Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Konsultasi dilakukan pada hari Rabu apabila dalam minggu tersebut tidak ada kegiatan Rapat Paripurna.
- e. Perlu dilakukan penambahan jumlah Peserta pada pelaksanaan Sosialisasi Produk Hukum Daerah pada Sub. Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan dan pelaksanaan Reses pada Sub. Kegiatan Pelaksanaan Reses, sesuai dengan Rekomendasi Rapat Kerja dan ketersediaan anggaran.
- f. Perihal rekomendasi pemberian uang transport sebagai pengganti seminar kit kepada Peserta Sosialisasi Produk Hukum Daerah dan Pelaksanaan Reses akan dilakukan kajian terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- g. Rincian kegiatan AKD dan AKD lainnya yang telah dibahas dalam rapat kerja ini, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan, dan akan diselaraskan oleh Sekretariat DPRD Kota Medan sesuai kemampuan keuangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Laporan Hasil Rapat Kerja DPRD Kota Medan Tahun 2023 dalam rangka Penyusunan Program Kerja DPRD Kota Medan Tahun Anggaran 2024, pada tanggal 16 s.d. 18 Juli 2023, bertempat di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 05 September 2023

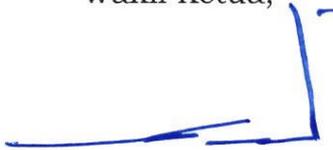
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

Ketua,



HASYIM, S.E.

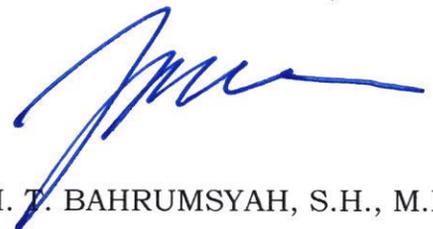
Wakil Ketua,



Wakil Ketua,



Wakil Ketua,



H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M. H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I. H. T. BAHRUMSYAH, S.H., M.H

Tembusan:

1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan.

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : 100.3.2 / 13351

TANGGAL : 05 SEPTEMBER 2023

TENTANG : PROGRAM KERJA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA MEDAN
TAHUN 2024.

| No | PROGRAM/ SUB KEGIATAN | Volume per Tahun (Usulan) |
|--|--|------------------------------|
| I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | |
| 1. | Pendalaman Tugas DPRD | |
| | a. Orientasi Pimpinan dan DPRD | 1 Kali |
| | b. Bimbingan Teknis DPRD dan Lainnya Sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku | 6 Kali |
| 2. | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | |
| | Rapat Paripurna : | 60 Kali |
| | a. Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) | 1 Kali |
| | b. Reses | 3 Kali |
| | c. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) | 1 Kali |
| | d. Laporan Pertanggungjawaban APBD | 1 Kali |
| | e. KUA PPAS R. APBD | 1 Kali |
| | f. KUA PPAS P. APBD | 1 Kali |
| | g. P. APBD 2024 | 1 Kali |
| | h. R. APBD 2025 | 1 Kali |
| | i. Sosialisasi Produk Hukum Daerah | 24 Kali |
| | j. Paripurna lainnya | 2 Kali |
| | k. Penyampaian Program Kerja DPRD | 1 Kali |
| | l. Peringatan Hari Jadi Kota Medan | 1 Kali |
| | m. Peringatan HUT RI | 1 Kali |

| No | PROGRAM/ SUB KEGIATAN | Volume per Tahun (Usulan) |
|--|---|---------------------------|
| | n. Paripurna Ranperda dan Non Ranperda | 50 Kali |
| | o. Penyampaian Pokir | 1 Kali |
| 3. | Fasilitasi Fraksi DPRD | |
| | Rapat-rapat fraksi | 36 Kali |
| II PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | |
| 1. | Pembahasan Kebijakan Anggaran | |
| | a. Rapat-rapat Badan Anggaran | 8 Kegiatan |
| | 1) Rapat Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2023 | 1 Kegiatan |
| | 2) Rapat Pembahasan menindaklanjuti Hasil Evaluasi Gubernur SUMUT terhadap Ranperda Kota Medan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2023 | 1 Kegiatan |
| | 3) Rapat Pembahasan KUA PPAS Perubahan APBD TA. 2024 | 1 Kegiatan |
| | 4) Rapat Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Perubahan APBD TA. 2024 | 1 Kegiatan |
| | 5) Rapat Pembahasan Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Gubernur SUMUT terhadap Ranperda Kota Medan tentang Perubahan APBD TA. 2024 | 1 Kegiatan |
| | 6) Rapat Pembahasan KUA PPAS R. APBD TA. 2025 | 1 Kegiatan |
| | 7) Rapat Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang R. APBD TA. 2025 | 1 Kegiatan |
| | 8) Rapat Pembahasan Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Gubernur SUMUT Terhadap Ranperda Kota Medan tentang R. APBD TA. 2025 | 1 Kegiatan |
| | b. Kunjungan Kerja Badan Anggaran | 6 Kegiatan |

| No | PROGRAM/ SUB KEGIATAN | Volume per Tahun (Usulan) |
|----|--|---------------------------|
| 2. | Pembahasan Rancangan Perda | |
| | a. Rapat-rapat Bapemperda, Panitia Khusus Pansus Ranperda dan Non Ranperda | 60 Kali |
| | b. Kunjungan Kerja Pansus dan Pansus terkait Ranperda dan Non Ranperda | 21 Kali |
| 3. | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | |
| | 1) Komisi 1 (kegiatan pengawasan bidang hukum dan pemerintahan) | |
| | • Rapat Komisi | 12 Kali |
| | • Kunjungan Kerja Dalam Daerah | 48 Kali |
| | • Kunjungan Kerja Luar Daerah | 60 Kali |
| | • Konsultasi Komisi Keluar Daerah | 10 Kali |
| | • Rapat Kerja | 48 Kali |
| | • Rapat Dengar Pendapat | 48 Kali |
| | • Rapat Gabungan Komisi | 4 Kali |
| | • Kunjungan Kerja Luar Negeri | 2 Kali |
| | 2) Komisi 2 (kegiatan pengawasan bidang kesejahteraan rakyat) | |
| | • Rapat Komisi | 12 Kali |
| | • Kunjungan Kerja Dalam Daerah | 65 Kali |
| | • Kunjungan Kerja Luar Daerah | 65 Kali |
| | • Konsultasi Komisi Keluar Daerah | 10 Kali |
| | • Rapat Kerja | 48 Kali |
| | • Rapat Dengar Pendapat | 96 Kali |
| | • Rapat Gabungan Komisi | 4 Kali |
| | • Kunjungan Kerja Luar Negeri | 2 Kali |
| | 3) Komisi 3 (kegiatan pengawasan bidang perekonomian) | |

| No | PROGRAM/ SUB KEGIATAN | Volume per Tahun (Usulan) |
|----|--|---------------------------|
| | • Rapat Komisi | 12 Kali |
| | • Kunjungan Kerja Dalam Daerah | 12 Kali |
| | • Kunjungan Kerja Luar Daerah | 42 Kali |
| | • Konsultasi Komisi Keluar Daerah | 10 Kali |
| | • Rapat Kerja | 52 Kali |
| | • Rapat Dengar Pendapat | 52 Kali |
| | • Rapat Gabungan Komisi | 4 Kali |
| | • Kunjungan Kerja Luar Negeri | 2 Kali |
| | 4) Komisi 4 (kegiatan pengawasan bidang infrastruktur) | |
| | • Rapat Komisi | 12 Kali |
| | • Kunjungan Kerja Dalam Daerah | 24 Kali |
| | • Kunjungan Kerja Luar Daerah | 50 Kali |
| | • Konsultasi Komisi Keluar Daerah | 10 Kali |
| | • Rapat Kerja | 6 Kali |
| | • Rapat Dengar Pendapat | 48 Kali |
| | • Rapat Gabungan Komisi | 4 Kali |
| | • Kunjungan Kerja Luar Negeri | 2 Kali |
| 4. | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | |
| | a. Rapat Badan Musyawarah | 20 Kali |
| | b. Kunjungan Kerja/ konsultasi Badan Musyawarah ke luar daerah | 5 Kali |
| 5. | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | |
| | a. Rapat-rapat Badan Kehormatan | |
| | 1) Rapat Badan Kehormatan | 4 Kali |
| | 2) Rapat Evaluasi Disiplin dan Kepatuhan Anggota DPRD | 3 Kali |

| No | PROGRAM/ SUB KEGIATAN | Volume per Tahun (Usulan) |
|----|--|---------------------------|
| | 3) Pengusulan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD | 1 Kegiatan |
| | b. Kunjungan kerja / Konsultasi Badan Kehormatan ke luar daerah | 4 Kali |
| 6. | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | |
| | a. Rapat Pimpinan | |
| | 1) Rapat Paripurna | 60 Kali |
| | 2) Rapat Pimpinan DPRD | 12 Kali |
| | 3) Rapat Konsultasi | 12 Kali |
| | 4) Rapat Badan Musyawarah | 24 Kali |
| | 5) Rapat Badan Anggaran | 8 Kali |
| | 6) Rapat Gabungan Komisi | 4 Kali |
| | 7) Rapat Panitia Khusus | 60 Kali |
| | 8) Rapat Kerja | 1 Kali |
| | 9) Kunjungan Kerja Pimpinan DPRD Ke Luar Daerah | 36 Kali |
| | 10) Konsultasi Pimpinan DPRD Keluar Daerah | 48 Kali |
| | 11) Kunjungan Luar Negeri | 6 Kali |
| 7. | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | |
| | a. Rapat-rapat Bapemperda | |
| | 1) Rencana Propemperda Tahun 2024 | 15 Ranperda |
| | 2) Rapat Bapemperda | 24 Kali |
| | b. Kunjungan Kerja Bapemperda | 6 Kali |
| 8. | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik | |
| | a. Penyusunan naskah akademik/ draft ranperda | 10 Dokumen |
| 9. | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | |
| | a. Sosialisasi Produk Hukum Daerah | 24 Kali |

| No | PROGRAM/ SUB KEGIATAN | Volume per Tahun (Usulan) |
|-----|---|---------------------------|
| 10. | Penyusunan Program Kerja DPRD | |
| | a. Rapat Kerja DPRD | 2 Kali |
| 11. | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | |
| | a. Kunjungan ke luar negeri | 5 Kali |
| 12. | Pelaksanaan Reses | |
| | a. Pelaksanaan Reses | 3 Kali |

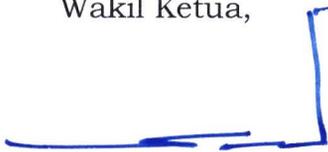
Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 05 September 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN
Ketua,



HASYIM, S.E.

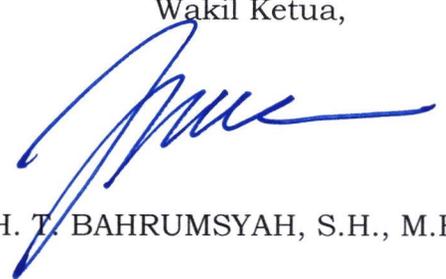
Wakil Ketua,



Wakil Ketua,



Wakil Ketua,



H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M. H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I. H. T. BHRUMSYAH, S.H., M.H

Tembusan:

1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan.